

LKj

Laporan Kinerja Tahun 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jambi, Januari 2025
KEPALA DINAS,

Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701025 199003 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang memuat Rencana, Capaian, dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Ringkasan Prestasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang dihasilkan di Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan , dengan indikator dan capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :
 - (1). Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan, dengan rasio capaian kinerja sebesar **51,98 %**.
 - (2). Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, dengan rasio capaian kinerja sebesar **550 %**.
 - (3). Desa Mandiri Pangan, dengan rasio capaian kinerja sebesar **192,16 %**.
 - (4). Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan rasio capaian kinerja sebesar **337,26%**
2. Sasaran Meningkatkan Akses Terhadap Bahan Pangan, dengan indikator dan rasio capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :
 - (1). Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras) CV < 10%, dengan rasio capaian kinerja sebesar **238,095 %**.
 - (2). Stabilitas Harga Pangan Strategis (Hortikultura) CV < 30%, rasio capaian kinerja sebesar **250 %**.
3. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal, dengan indikator dan rasio capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :
 - (1). Skor PPH Ketersediaan, dengan rasio capaian kinerja **104,63%**.

- (2). Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr), dengan rasio capaian kinerja sebesar **95,92%**.
- (3). Ketersediaan Protein (gr/kap/hr), dengan rasio capaian kinerja sebesar **85,08%**.
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal, dengan indikator dan rasio capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :
 - (1). Skor PPH Konsumsi, dengan rasio capaian kinerja adalah **97,16 %**.
 - (2). Konsumsi Beras (kg/kap/thn), dengan rasio capaian kinerja **107,92 %**.
 - (3). Konsumsi Energi (kkal/kap/hr), dengan rasio capaian kinerja **91,64 %**.
 - (4). Konsumsi Protein (gr/kap/hr), dengan rasio capaian kinerja **95,50 %**.
5. Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jambi, dengan rasio capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar **116,45 %**.
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas, dengan indikator dan rasio capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :
 - (1). Predikat AKIP, dengan rasio capaian kinerja adalah 87,6 %.
 - (2). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan rasio capaian kinerja **106,39 %**.Evaluasi atas Pencapaian Kinerja dan Permasalahan yang ditemui pada setiap Sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kedepan sebagai berikut :
 1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
 2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam perbaikan Kinerja ditahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
I. PENDAHULUAN	2
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Tugas dan Fungsi	4
1.3. Isu Strategis	5
1.4. Keadaan Pegawai	7
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	11
1.6. Keuangan	12
1.7. Sistematisasi LKjP	13
II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Perencanaan Strategis	16
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	16
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024	25
2.3.1. Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.....	21
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	26
2.4. Instrumen Pendukung	27
III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	28
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
Sasaran 1.	33
Sasaran 2.	40
Sasaran 3.	44
Sasaran 4.	47
Sasaran 5.	51
Sasaran 6.	55
3.3. Bentuk Penyajian Data Kinerja	57
3.4. Realisasi Anggaran	59
3.5. Analisis Efisiensi	63
IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	66
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2. Kegiatan Dumisake	
3. Penghargaan yang pernah diterima	

Daftar Tabel

Tabel. 1.1.	Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024.....	9
Tabel. 1.2.	Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024.....	9
Tabel. 1.3.	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023.....	12
Tabel. 2.1.	Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026	20
Tabel. 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	22
Tabel. 2.3.	Sasaran Strategi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	22
Tabel. 2.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	23
Tabel. 2.5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel. 2.6.	Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2024.....	25
Tabel. 2.7.	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	26
Tabel. 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel. 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel. 3.3.	Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.....	32
Tabel. 3.4.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	34
Tabel. 3.5.	Capaian Kinerja 2022-2024.....	34
Tabel. 3.6.	Distribusi Kecamatan Rentan dan Tahan Pangan (Prioritas 1-6) di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Komposit.....	37
Tabel. 3.7.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	38
Tabel. 3.8.	Capaian Kinerja 2022-2024	38
Tabel. 3.9.	Cadangan Beras Pemerintah (CPB) Provinsi Jambi Tahun 2024 (Per 31 Desember 2024)	40
Tabel. 3.10.	Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024.....	40
Tabel. 3.11.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	41
Tabel. 3.12.	Capaian Kinerja 2022-2024	41
Tabel. 3.13.	Laporan Perkembangan Harga Pangan Pokok/Strategis Tingkat Eceran/Konsumen Provinsi Jambi Tahun 2024	43
Tabel. 3.14.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	44
Tabel. 3.15.	Capaian Kinerja 2022-2024.....	45
Tabel. 3.16.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	48
Tabel. 3.17.	Capaian Kinerja 2022-2024.....	48
Tabel. 3.18.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	51

Tabel. 3.19.	Capaian Kinerja 2022-2024.....	52
Tabel. 3.20.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	55
Tabel. 3.21.	Capaian Kinerja 2022-2024.....	56
Tabel. 3.22.	Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah.....	58
Tabel. 3.23.	Realisasi APBD TA. 2024 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	60
Tabel. 3.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2024	62
Tabel. 3.25.	Analisis Efisiensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2024.....	63

Daftar Gambar

Gambar. 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024.....	3
Gambar. 1.2.	Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024	7
Gambar. 1.3.	Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024	8
Gambar. 1.4.	Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024.....	8
Gambar. 1.5.	Diagram Profil Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024	9

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
2. Mendorong Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

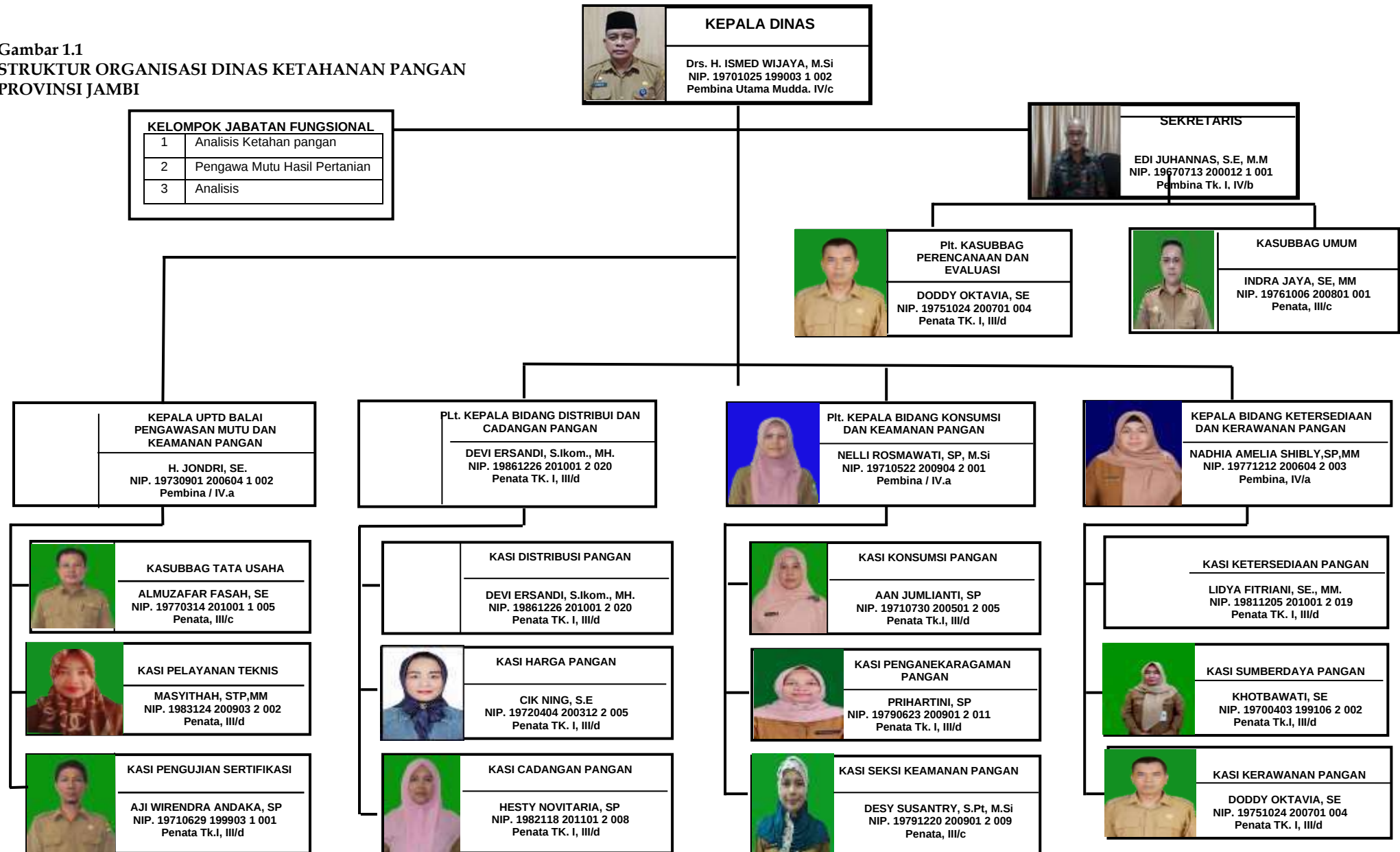
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 26 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan unsur organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya saat ini mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan

Adapun pelaksanaan anggaran pada Tahun 2024 menggunakan struktur Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1 tanggal 12 Januari 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2024.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI



1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah Sarana dan Prasarana Transportasi di dan dari

Sentra Produksi belum memadai, yang kedua adalah Dukungan Anggaran dan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal masih sangat terbatas dalam upaya pemenuhan sebagian kebutuhan energi dan umbi-umbian.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3. Isu Strategis

Eksistensi sebuah Institusi bergantung sejauh mana Institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk Sangat Rawan Pangan Tahun 2023 Provinsi Jambi sebesar **10,58 %**, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan Infrastruktur Dasar Pedesaan, Potensi Sumberdaya Pangan yang rendah dan atau belum dimanfaatkan, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil.
2. Pengelolaan Kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat belum maksimal.
3. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efesiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan.
4. Inflasi daerah berfluktuasi karena kenaikan harga pangan dan pangan olahan.
5. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang masih belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 sebesar **92,5**.
6. Pola pangan masyarakat yang sebagian besar masih sebatas memenuhi kalori saja, belum menerapkan Pangan Beragam, Berigizi, Berimbang dan Aman, Hal

ini dapat dilihat dari masih tingginya tingkat konsumsi beras penduduk yakni Tahun 2024 ini sebesar 78,3 kg/kap/tahun.

7. Pemberdayaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun di daerah-daerah sentra produksi.
8. Pekarangan belum diperhitungkan oleh masyarakat sebagai salah satu media yang potensial untuk memproduksi bahan pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi, sedangkan penurunan produksi bahan pangan pokok akibat alih fungsi lahan dan iklim ekstrim sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan dari potensi lokal.
9. Keamanan pangan segar belum dianggap begitu penting karena efek residu pestisida dan bahan tambahan pangan yang tidak langsung dirasakan oleh konsumen.

1.4. Keadaan Pegawai

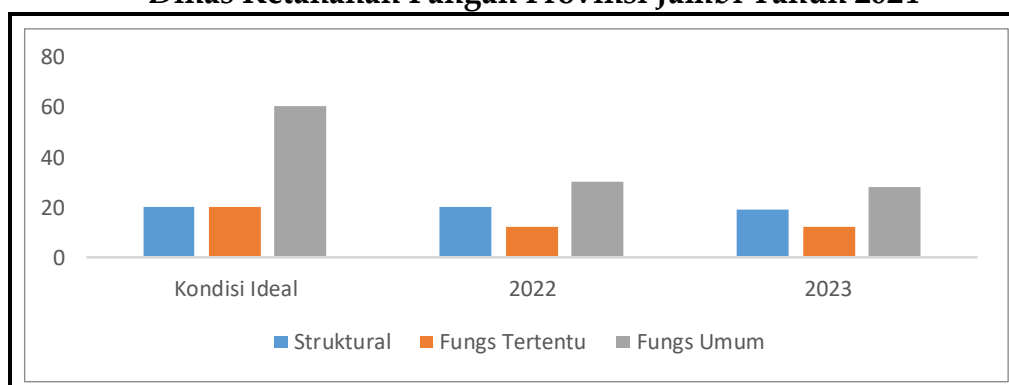
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 59 orang Pegawai yang terdiri dari ; 18 orang Pejabat Struktural, 18 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 23 orang Fungsional Umum.

Penyebaran Pegawai tersebut sebanyak 47 orang Pegawai di instansi Induk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan 12 orang Pegawai di UPTD BPMKP. Pada instansi induk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terdapat 14 orang Pejabat Struktural, 13 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 20 orang Fungsional Umum. Sementara sebaran di UPTD terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 5 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 3 orang Fungsional Umum.

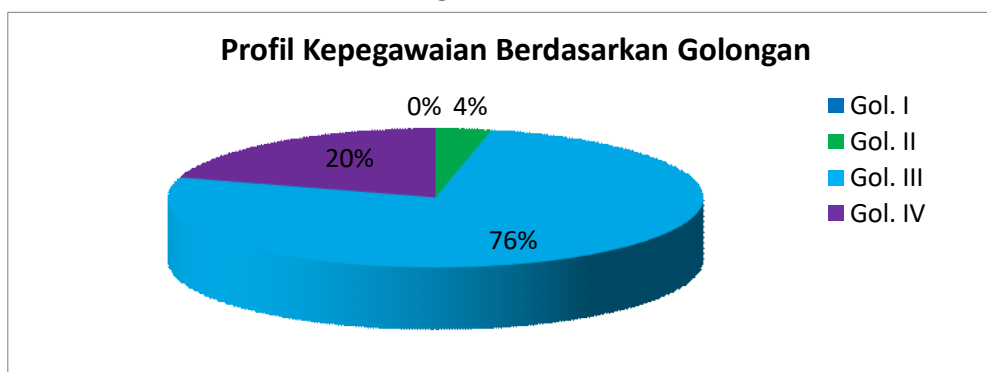
Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam tabel berikut :

Gambar 1.2.
Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber : Dishanpan, 2024

Gambar 1.3.
Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024

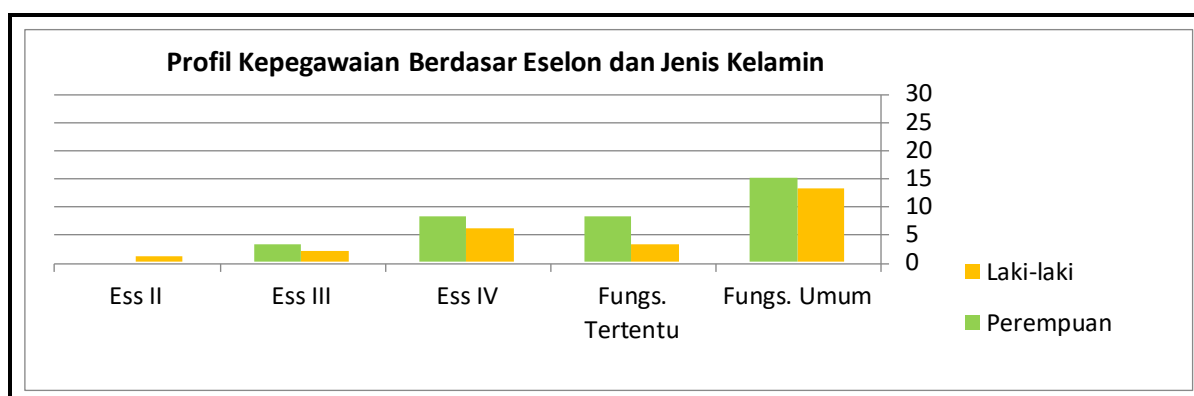


Sumber : Dishanpan, 2024

Berdasarkan Grafik di atas tergambar bahwa Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didominasi oleh Gol III sebanyak 45 orang atau 77 %, dan Gol IV sebanyak 12 orang atau 20 %, serta Gol II sebanyak 2 orang atau 3 %, sehingga total pegawai 59 orang yang terdiri dari Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu maupun Fungsional Umum.

Profil Kepegawaian Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.4.
Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber : Dishanpan, 2024

Dari Grafik diatas dapat terlihat bahwa di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sudah sesuai mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya berimbang, bahkan jumlah

pegawai perempuan lebih dominan dibanding laki-laki, adapun rincian pegawai terhadap berdasarkan eselon dan jenis kelamin sebagai berikut :

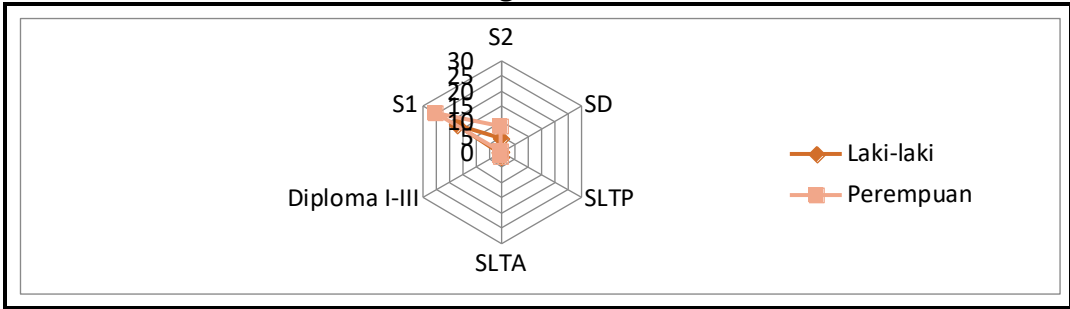
Tabel 1.1. Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III	2	2
3.	Eselon IV	4	9
4.	Fungsional Tertentu	4	14
5.	Fungsional Umum	11	12
	TOTAL	22	37

Sumber : Dishanpan, 2024

Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5.
Diagram Profil Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber : Dishanpan, 2024

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana yaitu S1, adapun rincian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.2. Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2024

No.	Uraian	Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)
1.	S2	4	10
2.	S1	15	25
3.	D 1-3	0	0
4.	SLTA	3	2
	TOTAL	22	37

Sumber : Dishanpan, 2024

Perubahan Budaya Kinerja pada Pegawai :

Pencapaian visi, misi dan tujuan ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Khususnya, target merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah khusus.

Penetapan target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja adalah bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Yang merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen antara pimpinan unit kerja yang lebih tinggi dengan pimpinan unit kerja dibawahnya guna mencapai target kerja yang terukur serta keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab bersama. Sebagai wujud komitmen dari terlaksananya seluruh target kinerja adalah penilaian yang mencapai 100%.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah Atasan Langsung dari masing-masing pegawai. Pelanggaran disiplin bukan delik aduan. Oleh karena itu, setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti/melakukan pemanggilan untuk diperiksa.

Akan tetapi bersama-sama menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin, rasa saling menghormati dan menghargai terhadap sesama pegawai yang ada di instansi dan juga melakukan komunikasi yang baik dengan menjaga tutur kata yang baik saat berbicara, sehingga tidak ditemui pelanggaran atau hukuman pada pegawai.

Pengetahuan tentang disiplin pegawai negeri sipil sangat penting bagi pegawai terutama mengenai kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil. Dengan hal tersebut, pegawai dapat menjauhi segala bentuk larangan dan mematuhi kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, Untuk menjaga harkat dan martabat instansi di mata masyarakat, maka seluruh pegawai wajib mematuhi disiplin pegawai negeri sipil serta nilai-nilai dan kode etik.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3. Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	17	Baik
2	Alat Bengkel Bermesin	1	Baik
3	Alat Kantor	78	Baik/Kurang Baik
4	Alat Rumah Tangga	1.007	Baik/Kurang Baik
5	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55	Baik
6	Alat Studio	3	Baik
7	Alat Kesehatan Umum	2	Baik
8	Komputer Unit	65	Baik/Kurang Baik
9	Peralatan Komputer	48	Baik/Kurang Baik
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	Baik
11	Jaringan Listrik	2	Baik
12	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	Baik
13	Aset Lain-lain	9	Rusak Berat
	Jumlah	1.290	

Sumber : Dishanpan, 2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun 2024 adalah berasal dari APBD Provinsi Jambi dengan mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar **Rp. 16.179.844.848.-** dan setelah perubahan menjadi sebesar **Rp. 16.785.685.207.-** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp. 16.578.766.143.-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 206.919.064.-** yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Adapun belanja tersebut digunakan untuk mendukung 4 (empat) Program Utama, 1 (satu) Program Pendukung, dan 14 (empat belas) Kegiatan, serta 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah

Sistematika Laporan yang dianjurkan mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah.

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, sajikan tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Jelaskan pula apakah ada perbedaan antara target Kinerja pada Renja pada Tahun 2023 dengan yang di Perjanjian Kinerjanya Tahun 2023.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan narasi/deskripsi capaian kinerja perangkat daerah **untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah** sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2024.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	...	...			
2.					
dst.					

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu 2023 dan beberapa tahun terakhir (2020).

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	...	...				
2.						
dst.						

Gambarkan pula capaian kinerja pertahun tersebut dalam bentuk **grafik/diagram/pie/line** dan sebagainya.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

No	Indikator	Awal RPJMD 2020	Capaian			Target 2024	Capaian s.d. 20234 terhadap target 2024 (%)
			2021	2022	2023		
1.	...	...		...		...	
2.							
dst.							

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

No	Indikator	Capaian Nasional 2023	Capaian		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	...	...		...	
2.					
dst.					

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari realisasi anggaran yang disiapkan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). *Perjanjian Kinerja*
- 2). *Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Gubernur/Kepala OPD*
- 3). *Lain-lain yang dianggap perlu*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Pada Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memasuki tahun keempat pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk Pembangunan Berkelanjutan, Perumusan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strateis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan

periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi Pembangunan, yaitu *“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP)”*.

- Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerinth Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman : Terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatkan iklim investasi, terujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

- Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat plural.
- Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi yakni :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan Langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Misi pertama, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas yang mana sasaran adalah : a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Misi kedua, yaitu : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditi unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana sasaran strategis yang dilakukan adalah : a. memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan; b. meningkatkan industri pengolahan; c. meningkatkan peran sektor pariwisata serta IKM pendukung pariwisata; d. memantapkan kualitas pelayanan dasar dan insfrastruktur dasar; e. Meningkatkan kualitas lingkungan; f. Menurunnya tingkat pengangguran; dan g. Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

Misi ketiga, yaitu : memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya, agamis dan berkesetaraan gender yang mana sasaran strategis adalah : a. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; b. meningkatnya akses terhadap pendidikan; c. meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya; d. meningkatnya tolerasni intra dan antar agama; dan e. meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
					Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industry pengolahan	Kontribusi industry pengolahan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)
			Tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
				Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan
3.	Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi

				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender
--	--	--	--	---	----------------------------

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berupaya mendukung Pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan**.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah : **Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan**, maka ditetapkan Sasaran Strategis T1S1 : Penangan Daerah Rawan Pangan; T1S2 : Penguatan Cadangan Pangan; T1S3 : Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan; T1S4 : Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal; T1S5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal; dan T1S6 : Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Pencapaian sasaran strategis Dishanpan Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Balitbangda Provinsi Jambi 2021-2026. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	Penangan Daerah Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan
				% Daerah Rentan Rawan Pangan
				Desa Mandiri Pangan
			Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
				Stabilitas Harga Pangan Pokok
				Stabilitas Harga Pangan Strategis
			Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor PPH Ketersediaan
				Ketersediaan Energi kkal/kap/hr
				Ketersediaan Protein gr/kap/hr
		Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal		Skor PPH Konsumsi
				Konsumsi Beras kg/kap/thn
				Konsumsi Energi kkal/kap/hr
				Konsumsi Protein gr/kap/hr
			Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	% Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber : Renstra Dishanpan Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2020	Target tahunan						Target Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1..	Penanganan Daerah Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	%	9,5	9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
		% Daerah Rentan Rawan Pangan	%	9,5	9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
		Desa Mandiri Pangan	Desa	21	22	31	41	51	61	71	71
2.	Penguatan Cadangan Pangan	% Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	13,75	19,61	19,61	39,22	58,83	79,25	100	100
3.	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab/Kota	11	11	11	11	11	11	11	11
		Harga Pangan Pokok	CV	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
		Pangan Strategis	CV	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%
4.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor PPH Ketersediaan	Skor	84,81	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	91,5
		Energi	kkal/kap/hr	3005	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3014
		Protein	gr/kap/hr	80,05	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
5	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	Skor	92,3	90,6	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5	95,5
		Konsumsi Beras	kg/kap/thn	86	89,1	88,2	87,3	86,4	86,2	86,0	86,0
		Konsumsi Energi	kkal/kap/hr	2139,4	2083	2090,3	2095	2095,1	2100	2100	2100
		Konsumsi Protein	gr/kap/hr	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63

6.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	% Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	64,21	66,71	69,21	71,71	74,21	76,71	79,21	79,21
----	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Renstra Dishanpan Provinsi Jambi, 2022

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1. Terbangunnya Struktur Perekonomian yang kuat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Keunggulan Kompetitif Sektor Pertanian menjadi Basis Ekonomi yang dikelola secara Efisien dan Menghasilkan Komoditi Berkualitas, Agroindustri yang Berdaya Saing menjadi Motor Penggerak Perekonomian guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Bermutu dan Berdaya Saing.
2. Penguatan Cadangan Pangan	2. Pengelolaan Sumber Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2. Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan diarahkan Menjaga Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan Daerah melalui Peningkatan Kemampuan Produksi Lokal yang didukung Kelembagaan Ketahanan Pangan yang Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat.
3. Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	3. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya sesuai Kebutuhan Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3. Kemandirian Pangan yang Aman, Kualitas Gizi yang Baik dan Jaminan Pangan untuk setiap Rumah Tangga
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	4. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
5. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	5. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	
6. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	6. Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	

Sumber : Renstra Dishanpan Provinsi Jambi, 2022

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dishanpan Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunkan Jumlah Penduduk Rawan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	5,5 %
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5,5 %
		Desa Mandiri Pangan	51 Desa
		Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	19,61 %
2.	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV<10%
		Stabilitas Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV<30%
3.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor PPH Ketersediaan	89,5
		Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	3.012
		Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	82,5
4.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	95,2
		Konsumsi Beras (kg/kap/thn)	84,5
		Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.195,5
		Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	61,5
5.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	74,21%
6.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik	Predikat AKIP	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebesar **Rp. 16.338.872.912.-** dengan rincian Belanja Operasi **Rp. 15.990.895.784.-** dan Belanja Modal **Rp. 347.977.128.-**.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 total anggaran menjadi sebesar **Rp. 16.785.685.207.-**, dengan rincian Belanja Operasi **Rp. 16.578.766.143.-** dan Belanja Modal **Rp. 206.919.064.-**.

2.3.1. Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan target belanja anggaran murni yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebesar **Rp. 16.338.872.912.-** dengan rincian Belanja Operasi **Rp. 15.990.895.784.-** dan Belanja Modal **Rp. 347.977.128.-**.

Dan setelah perubahan sebesar **Rp. 16.785.685.207.-**, dengan rincian Belanja Operasi **Rp. 16.578.766.143.-** dan Belanja Modal **Rp. 206.919.064.-**, sebagaimana pada table 2.6. berikut ini :

**Tabel 2.6. Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
APBD Perubahan Tahun 2024**

No	Uraian	Target (Rp)	Persentase
1	Belanja Operasi - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bantuan Sosial	Rp . 16.578.766.143.- Rp . 9.672.254.101.- Rp. 5.973.512.042.- Rp. 933.000.000.-	98,77 57,62 35,59 5,56
2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	Rp. 206.919.064.-	1,23
	JUMLAH	Rp. 16.785.685.207.-	100,00

Sumber : Dishanpan, 2024

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024**

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Rp. 2.305.794.000.-	13,74	Program Penanganan Kerawanan Pangan - Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi - Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
	JUMLAH PROGRAM 1	Rp. 2.305.794.000.-	13,74	
2.	Penguatan Cadangan Pangan	Rp. 688.878.000.-	4,10	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
	JUMLAH PROGRAM 2	Rp. 688.878.000.-	4,10	
3.	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Rp. 1.377.059.200.-	8,20	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. - Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
4.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal			
5.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal			
	JUMLAH PROGRAM 3	Rp. 1.377.059.200.-	8,20	
6.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	Rp. 183.289.000.-	1,09	Program Pengawasan Keamanan Pangan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
	JUMLAH PROGRAM 4	Rp. . 83.289.000.-	1,09	
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Rp. 12.230.665.007.-	72,86	Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	JUMLAH PROGRAM 5	Rp. 12.230.665.007.-	72,86	
	TOTAL	Rp. 16.785.685.207	100,00	

Sumber : Dishanpan, 2024

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Informasi dan berita terkait Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tersebut dapat dilihat melalui Website :

<http://dishanpan.jambiprov.go.id> dan e-mail : dishanpan@jambiprov.go.id.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA/ KODE WARNA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	%	5,5	10,58	51,98	Rendah
		% Daerah Rentan Rawan Pangan	%	5,5	0	550	Sangat Baik
		Desa Mandiri Pangan	Desa	51	98	192, 16	Sangat Baik
		% Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	19,61	66,136	85,36	Sangat Baik
2	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 4,2 %	238,095	Sangat Baik
		Stabilitas Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 12 %	250	Sangat Baik
3	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor PPH Ketersediaan	Skor	89,5	93,64	104,63	Sangat Baik
		Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3.012	2.889	95,92	Sangat Baik
		Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	82,5	70,19	85,08	Tinggi
4	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	Skor	95,2	92,5	97,16	Sangat Baik
		Konsumsi Beras	Kg/kap/thn	84,5	78,3	107,92	Sangat Baik
		Konsumsi Energi	Kkal/kap/hr	2.195,5	2.012	91,64	Sangat Baik
		Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	61,5	58,73	95,50	Sangat Baik
5	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	% peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan di Prov. Jambi	%	74,21	86,42	116,45	Sangat Baik
6	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Predikat AKIP	Skor	BB (75)	65,7	87,6	Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	84,5	89,9	106,39	Sangat Baik

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang merupakan salah satu indikator kinerja daerah dan 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun 2024 telah terealisasi secara keseluruhan memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase 91 -100 % kriteria sangat baik, bahkan ada yang melebihi target (tercapai $\geq 100\%$), namun masih ada indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada persentase penduduk berisiko rawan pangan dengan kriteria rendah. Hal diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk berisiko rawan pangan. Artinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi hingga akhir Tahun 2024 telah mampu melaksanakan Program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sebelum membahas tentang Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, terlebih dahulu dalam kesempatan ini perlu juga disampaikan terkait Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi termasuk salah satu OPD yang turut serta dalam membangun Provinsi Jambi yang tergabung dalam Misi Gubernur Jambi yaitu “Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah” yang tujuannya untuk memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (Ekonomi Hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator Tujuan yang digunakan yaitu indikator yang kedua, “Menurunkan Angka Kemiskinan” dengan sasaran meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan. Adapun indikator sasarannya adalah Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Data IKP

dapat menjelaskan ketahanan pangan suatu daerah. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Adapun 9 (sembilan) indikator sebagai dasar penentuan IKP, adalah sebagai berikut :

Aspek Ketersediaan Pangan :

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah

Aspek Keterjangkauan Pangan :

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Aspek Pemanfaatan Pangan :

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan Penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Adapun target dan realisasi capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut :

**Tabel 3.3. Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026**

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2020 (Awal)		70,00	
2	2021	71,00	74,18	104,48
3	2022	71,00	69,50	97,89
4	2023	72,00	72,17	100,24
5	2024	73,00	74,94	102,66
6	2025	74,00	-	-
7	2026	75,00	-	-

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Berdasarkan Tabel 3.3. di atas, terlihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dari tahun 2020-2024 terjadi perubahan setiap tahunnya, baik IKP-nya maupun capaian realisasi kinernjanya. Pada tahun 2021, target IKP sebesar 71,00 , realisasinya sebesar 74,18 sehingga realisasi capaian kinerja IKP-nya adalah sebesar **104,48%**, tahun 2022 mengalami penurunan, dimana realisasi IKP sebesar 69,50 dari target 71,00 sehingga realisasi capaian kinerja nya menjadi **97,89%**. Sedangkan pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, yakni dari target 72,00 dengan realisasi sebesar 72,17 sehingga Capaian Kinerjanya menjadi **100,24%**. Tahun 2024 IKP Provinsi Jambi mengalami kenaikan, dimana realisasi IKP sebesar 74,94 dari target 73. Nilai IKP Provinsi Jambi Tahun 2024 termasuk kelompok Prioritas 6 (Sangat Tahan). Pencapaian Provinsi Jambi ini dapat diartikan bahwa Provinsi Jambi mampu mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Secara umum, berdasarkan penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tahun 2021-2024, dapat dikatakan bahwa kinerja peningkatan IKP Tahun 2021 -2024 adalah **Sangat Baik**.

Selanjutnya untuk membahas terkait capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2024, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1.

Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Persentase Penduduk Berisiko Rentan Rawan Pangan.
2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.
3. Desa Mandiri Pangan.
4. Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Sasaran ini dicapai melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, yang operasionalnya didukung oleh Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Kewenangan Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan, yaitu Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang operasionalnya didukung oleh :
 - Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan didukung Sub Kegiatan yaitu Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan Sub Kegiatannya yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	5,5	10,58	51,98
		% Daerah Rentan Rawan Pangan	5,5	0	
		Desa Mandiri Pangan	51	98	192, 16

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan indikator-indikatornya sebagian besar telah mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaiannya sangat baik, namun masih ada 1 indikator yang masih rendah yakni persentase penduduk beresiko rawan pangan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

N0	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	7,5 %	12.14 %	61,78	6,5 %	12,83 %	50,66	5,5 %	10,58 %	51,98
2.	% Daerah Rentan Rawan Pangan	7,5 %	4,90 %	153,06	6,5 %	2,80 %	232,14	5,5 %	0%	550%
3.	Desa Mandiri Pangan	31 Desa	53 Desa	170,97	41 Desa	41 Desa	100,00	51 Desa	98 Desa	192, 16

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

IK : % Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan.

Dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ditargetkan Penurunan Penduduk Rawan Pangan setiap tahun sebesar 1%, dan target Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan hingga akhir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan bahwa diharapkan Penduduk Berisiko Rentan Rawan Pangan Provinsi Jambi menjadi 5,5%.

Untuk mengukur persentase penurunan penduduk berisiko rentan rawan pangan tersebut memerlukan data yang lengkap dan perlu kajian khusus, dan

dikarenakan keterbatasan baik dana maupun data yang tersedia, maka data yang kami tampilkan merupakan hasil kajian dari Badan Pangan Nasional RI dan merupakan angka Tahun 2024.

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan. Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan : yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 10,58% dari target 5,5 %. Artinya untuk indikator Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan selama Tahun 2024 tidak terjadi penurunan, melainkan sebaliknya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 5,08% dari yang ditargetkan. Namun jika dibandingkan Tahun 2023, Provinsi Jambi mengalami penurunan jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan, dimana tahun 2023 realisasi Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi sebesar 12,83% dari target 6,5% yang artinya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 6,33%, ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,08%.

Persentase Capaian Kinerja terkait % Penduduk Berisiko Rawan Pangan baru mencapai 51,98% dan termasuk kategori rendah. Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 6,33% diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Karena adanya Covid-19 target persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan mengalami kenaikan namun dalam Resntra

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak direvisi sehingga target masih menggunakan target sebelum adanya pandemi Covid-29.

Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk beresiko rawan pangan.

IK : % Daerah Rentan Rawan Pangan.

Untuk indikator penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan, berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024, dari 143 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi, tidak terdapat kecamatan rentan pangan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4. Untuk kecamatan yang tahan pangan sebanyak 143 kecamatan atau 100% terdiri dari 4,9% atau sebanyak 7 kecamatan prioritas 5 dan sebesar 95,105 atau sebanyak 136 kecamatan prioritas 6. Terjadi penurunan jumlah Daerah/Kecamatan yang Rentan Rawan Pangan dibanding tahun 2023, dimana terdapat 4 kecamatan prioritas 3. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi secara umum telah hampir dapat dikategorikan berada pada kondisi tahan pangan pada Tahun 2024, hal ini juga dipengaruhi oleh Bantuan Pangan yang disalurkan oleh Badan Pangan Nasional ke 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Bila kita melihat pada target penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2024, terlihat bahwa dari yang ditargetkan sebesar 5,5% diperoleh hasil bahwa Daerah Beresiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan persentase Daerah Beresiko Rawan Pangan sebesar 5,5% (5,5% – 0%) dari yang ditargetkan. Sedangkan rasio capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 550%. Ini menunjukkan capaian kinerja dengan nilai Sangat Baik (diatas 100%). Sebagai gambaran capaian kinerja penurunan persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2024 berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, sesuai dengan prioritas penanganan kerentanan dan ketahanan pangan secara komposit, dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut :

Tabel 3.6. Distribusi Kecamatan Rentan dan Tahan Pangan (Prioritas 1-6) di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Komposit

No	Kabupaten	Komposit					
		>= 0,80	0,64 - 0,79	0,48 - 0,63	0,32 - 0,47	0,16 - 0,31	< 0,16
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
1	Kerinci	0	0	0	0	0	18
2	Merangin	0	0	0	0	0	24
3	Sarolangun	0	0	0	0	0	10
4	Bungo	0	0	0	0	7	10
5	Tebo	0	0	0	0	0	12
6	Batanghari	0	0	0	0	0	8
7	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	11
8	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	13
9	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	11
10	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	8
11	Kota Jambi	0	0	0	0	0	11
	Provinsi Jambi	0	0	0	0	7	136

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

IK : Desa Mandiri Pangan.

Dari Tabel 3.5. di atas, untuk indikator Desa Mandiri Pangan, terjadi peningkatan desa mandiri pangan dari tahun ke tahun. Dimana dapat kita lihat bahwa tahun 2023 terdapat 41 desa mandiri pangan dan meningkat menjadi 98 desa mandiri pangan tahun 2024. Persentase Capaian Kinerja terkait desa mandiri pangan melebihi dari target yang telah ditentukan, yaitu target 51 desa dan tercapai 98 desa atau sebesar 192,16% masuk kategori tinggi.

Untuk mengentaskan daerah rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Pengembangan Pangan Lokal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu wilayah pedesaan dimana masih terdapat masyarakat yang tergolong dalam rentan rawan pangan dengan memberdayakan kelompok wanita tani di suatu desa untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sebagai penghasil pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Penguatan Cadangan Pangan, yaitu Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berupa Beras atau sering disebut juga dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bertujuan untuk mengantisipasi

Kerawanan Pangan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sasaran ini dicapai melalui Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	19,61 ton (kumulatif = 78,44%)	66,136 ton = 66,96 %	337,26% = 85,37%

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Dari tabel di atas bahwa sasaran kinerja dalam Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras untuk mengantisipasi Kerawanan Pangan dengan indikator-indikatornya telah mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaiannya yang sangat baik untuk semua indikatornya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Capaian Kinerja 2022-2024

No	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	19,61 ton =39,22 %	70,1 ton =	357,32 =178,66	19,61 ton = 58,83%	233,1	1.188,68 = 396,23	19,61 ton = 78,44	66,136 ton = 66,96	396,23% = 85,37

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

IK : Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Aturan yang mengatur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang tertuang pada pasal 2

ayat (2) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Surat Gubernur Jambi Nomor : S-2091/DISHANPAN-3.3/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Guna menindaklanjuti Peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan khusus mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2024. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013–2024 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan/disalurkan sebanyak 280.046 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan, sehingga stok Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar 66.136 kg atau sebesar 66,95% dari idealnya 98,770 kg.

Tahun 2024 ini melalui APBD Murni tidak ada penambahan cadangan beras Pemerintah Provinsi Jambi, dikarenakan keterbatasan anggaran, namun demikian stok yang ada diperkirakan masih mencukupi kebutuhan Masyarakat. Adapun rincian Kondisi Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.9. berikut :

**Tabel 3.9. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Jambi Tahun 2024
(Per 31 Desember 2024)**

NO	Tahun	Stok Awal (Kg)	Pengadaan (Kg)	Total Penyaluran (Kg)	Sisa (kg)	Jumlah CBP Ideal Tahun 2024 (Kg)	Persentase Keterseediaan CBP (%)	Keterangan
1	2013	0	70.000	0,0	70.000	98.77	66.136	Jumlah cadangan beras pemerintah provinsi jambi idela adalah 98.77 kg (Tabel perhitungan jumlah CBP Tahun 2024)
2	2014	70.000	20.000	3.449,0	86.551			
3	2015	86.551	0	9.348,5	77.203			
4	2016	77.203	0	22.837,5	54.365			
5	2017	54.365	7.000	6.102,0	55.263			
6	2018	55.263	12.000	5.400,0	61.863			Stok CBP yang ada per 31 Desember 2024 sebesar 66.136 kg
7	2019	61.863	3.805	24.396,0	41.272			
8	2020	41.272	948	0,0	42.220			
9	2021	42.220	103.500	37.560,0	108.160			
10	2021	108.160	9.285	0,0	117.445			
11	2022	117.445	4.423	11.746,0	110.122			
12	2022	110.122	115.221	0,0	225.343			
13	2023	225.343	0	738,0	224.605			Persentase Cadangan Pangan Provinsi Jambi = $66.136/98.77 \times 100 = 66,95 \%$
14	2024	0	0	77.277,0	147.328			
15	2024	0	0	22.980,0	124.348			
16	2024	0	0	36.450,0	87.898			
17	2024	0	0	21.762,0	66.136			
Jumlah			346.182	280.046	66.136			

Sumber : Dishanpan, 2024

Sedangkan total penyaluran cadangan beras pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Waktu	Jumlah (Kg)
1.	Bungo	Tungkal Ilir	Januari 2024	77.277
2.	Kerinci	Bungo Dani, Pelepat, Jujuhan	Februari 2024	22.980
3.	Sungai Penuh	Depati Tujuh, Air Hangat, Siulak	Maret 2024	36.450
4.	Tanjab Timur	Hamparan, Tanah Kampung	Juni 2024	21.762
		TOTAL PENYALURAN		738

Sumber : Dishanpan, 2024

Sasaran 2.

Meningkatkan Akses Terhadap Bahan Pangan dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Stabilitas Harga Pangan Pokok $CV < 10\%$.
2. Stabilitas Harga Pangan Strategis $CV < 30\%$.

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatkan Akses Terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok	CV < 10 %	CV < 4,2 %	238,095
		Stabilitas Harga Pangan Strategis	CV < 30 %	CV < 12%	250

Sumber : Dishanpan, 2024

Dari tabel 3.11. di atas, terlihat bahwa sasaran kinerja meningkatkan akses terhadap bahan pangan dengan indikator Stabilitasnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen, telah mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaiannya yang sangat baik, hanya saja harga komoditi cabe merah keriting yang masih terjadi lonjakan harga cukup tinggi dengan CV sebesar 34,4%, dan hal ini terjadi pada saat hari-hari besar keagamaan sehingga mempengaruhi fluktuasi harga komoditas strategis hortikultura. Namun secara umum CV harga pangan strategis masih dibawah 30%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi CV, baik pada pangan pokok maupun pangan strategis, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.12. berikut:

Tabel 3.12. Capaian Kinerja 2022-2024

No	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Stabilitas Harga Pangan Pokok	CV < 10 %	CV < 2,8%	357,14	CV < 10 %	CV < 6,6%	151,52	CV < 10 %	CV < 4,2%	238,095
2.	Stabilitas Harga Pangan Strategis	CV < 30 %	CV < 12,6%	238,10	CV < 30 %	CV < 18,1%	165,75	CV < 30 %	CV < 12%	250

Sumber : Dishanpan, 2024

IK : Stabilitas Harga Pangan Pokok.

Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait stabilitas harga pangan pokok adalah CV < 10%. Berdasarkan hasil

pemantauan harga yang dilakukan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan diperoleh gambaran bahwa Harga Pangan Pokok dalam hal ini beras selama Tahun 2024 dapat dikatakan Stabil dengan $CV < 4,2 \%$. Hal ini menunjukkan bahwa untuk harga pangan pokok (beras) selama Tahun 2024 di Provinsi Jambi cukup baik, tidak berfluktuasi terlalu tinggi.

IK : Stabilitas Harga Pangan Strategis

Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait Stabilitas Harga Pangan Strategis adalah $CV < 30\%$. Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan diperoleh gambaran bahwa Perkembangan Harga Pangan Strategis (Hortikultura) periode Januari sampai dengan Desember 2024 rata-rata untuk Komoditi Hortikultura Cenderung stabil dengan $CV < 12\%$.

Untuk selengkapnya Perkembangan Harga Pangan Pokok (Beras) dan Pangan Strategis (Hortikultura) sebagai mana tabel 3.13. berikut:

**Tabel 3.13. Laporan Perkembangan Harga Pangan Pokok/Strategis Tingkat Eceran/ Konsumen
Provinsi Jambi Tahun 2024**

Tanggal	Harga Rata-Rata/Bulan																				
	Beras Premium (Rp/Kg)	Beras Medium (Rp/Kg)	Kedelai Biji Kering (Impor) (Rp/Kg)	Bawang Merah (Rp/Kg)	Bawang Putih Bonggol (Rp/Kg)	Cabai Merah Keriting (Rp/Kg)	Cabai Rawit Merah (Rp/Kg)	Daging Sapi Murni (Rp/Kg)	Daging Ayam Ras (Rp/Kg)	Telur Ayam Ras (Rp/Kg)	Gula Pasir Konsumsi (Rp/Kg)	Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Rp/Ltr)	Tepung Terigu (Curah) (Rp/Kg)	Minyak Goreng Curah (Rp/Ltr)	Jagung Tk Peternak (Rp/Kg)	Ikan Kembung (Rp/Kg)	Ikan Tongkol (Rp/Kg)	Ikan Bandeng (Rp/Kg)	Garam Halus Beryodium (Rp/Kg)	Tepung Terigu Kemasan (non-curah) (Rp/Kg)	Beras SPHP (Rp/Kg)
Januari 2024	15.628	12.642	13.048	29.866	35.933	42.676	49.431	136.538	34.046	27.499	16.933	15.469	10.482	13.766	7.598	34.950	27.889	29.922	12.371	13.678	
Februari 2024	15.601	12.648	12.549	27.215	35.641	60.588	63.486	137.226	35.031	27.502	17.037	15.468	10.458	13.972	7.636	33.764	27.228	28.814	12.347	13.523	
Maret 2024	15.193	12.586	12.407	30.958	36.948	57.431	69.025	139.516	36.756	28.437	17.126	15.712	10.333	14.527	8.365	34.812	28.149	30.336	12.303	13.351	
April 2024	14.862	12.524	12.385	40.916	39.392	45.468	55.759	140.308	37.412	29.985	17.336	16.047	10.384	14.972	8.633	35.535	28.293	29.052	12.301	13.311	
Mei 2024	14.698	12.997	12.386	45.380	39.641	48.702	43.687	137.493	36.616	28.262	17.919	15.861	10.353	14.735	8.512	35.015	27.641	29.320	12.140	13.304	
Juni 2024	14.666	12.990	12.435	38.322	38.666	51.782	46.094	137.908	34.628	28.166	17.803	15.820	10.401	14.626		34.887	27.610	29.373	12.242	13.287	12.681
Juli 2024	14.686	12.979	12.383	28.441	36.950	37.292	58.776	137.281	31.849	27.896	17.523	15.910	10.334	14.859		35.235	27.735	30.130	12.254	13.264	12.629
Agustus 2024	14.811	13.018	12.411	21.473	36.984	37.377	57.541	137.273	31.249	27.321	17.490	16.003	10.288	15.012		36.160	29.246	29.786	11.967	13.136	12.602
September 2024	15.026	13.143	12.036	22.700	37.219	25.396	43.975	137.273	31.710	27.159	17.467	16.316	10.127	15.209		35.791	28.978	30.238	11.950	13.083	12.592
Oktober 2024	15.006	13.128	11.843	25.947	37.527	21.862	44.442	137.273	34.531	27.213	17.372	17.018	9.999	15.765		35.412	29.264	29.909	11.883	13.085	12.563
Nobemver 2024	15.000	13.162	11.802	30.967	37.921	22.652	37.670	137.333	35.943	27.097	17.366	17.315	9.874	16.453		35.602	28.811	31.405	11.867	13.083	12.556
Desember 2024	15.141	13.193	11.601	31.449	39.650	32.578	42.054	137.462	36.431	27.330	17.368	17.796	9.808	17.105	9.321	35.804	28.789	30.312	11.838	12.988	12.520
Rata-Rata Harga	15.027	12.918	12.298	31.016	37.692	40.115	50.977	137.730	34.651	27.809	17.393	16.241	10.235	15.086	8.130	35.271	28.334	29.967	12.121	13.257	12.582
HET/HAP	15.400	13.100	12.000	36.500-41.500	38.000	37.000-55.000	40.000-57.000	140.000	40.000	30.000	17.500			15.700	5.800				10.000		13.100
Δ rata-rata - HET/HAP	-373	-182	298	-10.484	-308	-14.885	-6.023	-2.270	-5.349	-2.191	-107			-614	2.330				2.121		-518
% terhadap HET/HAP	-2,42%	-1,39%	2,48%	25,26%	-0,81%	27,06%	10,57%	-1,62%	13,37%	-7,30%	-0,61%			-3,91%	40,18%				21,21%		-3,95%
Harga Tertinggi	15.628	13.193	13.048	45.380	39.650	60.588	69.025	140.308	37.412	29.985	17.919	17.796	10.482	17.105	9.321	36.160	29.264	31.405	12.371	13.678	12.681
Harga Terendah	14.666	12.524	11.601	21.473	35.641	21.862	37.670	136.538	31.249	27.097	16.933	15.468	9.808	13.766	7.598	33.764	27.228	28.814	11.838	12.988	12.520
StDev	325	247	392	7.173	1.371	13.110	9.708	1.073	2.118	821	285	749	229	959	652	628	698	695	206	200	53

Sumber : Dishanpan, 2024

Sasaran 3.

Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal, dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Skor PPH Ketersediaan.
2. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr).
3. Ketersediaan Protein (gr/kap/hr).

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal.	Skor PPH Ketersediaan	89,5	93,64	104,63
		Ketersediaan Energi	3.012 kkal/kap/hr	2.889 kkal/kap/hr	95,92
		Ketersediaan Protein	82,5 gr/kap/hr	70,19 gr/kap/hr	85,08

Sumber : Dishanpan, 2024

Dari tabel di atas bahwa pada sasaran kinerja Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 89,5 dengan realisasi sebesar 93,64. PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi dari 11 kelompok bahan makanan dalam NBM yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH ketersediaan. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk.

Dari hasil perhitungan NBM Tahun 2024, Ketersediaan Energi yakni sebesar **2.889**, ketersediaan kalori menurut sumbernya didominasi oleh bahan pangan yang berasal dari nabati. Besarnya sumbangan kalori yang bersumber dari nabati terhadap penyediaan energi sebesar 2.647 Kalori atau 91,62% dan sisanya 241 Kalori atau 8,34 % bersumber dari pangan hewani kkal/kap/hr.

Berdasarkan hasil penghitungan NBM Capaian Ketersediaan Protein sebesar 70,19 **gr/kap/hr**, Protein yang bersumber dari pangan nabati sebesar 49,31 gram per kapita per hari atau 70,25% dari total ketersediaan protein, sedangkan untuk protein yang bersumber dari pangan hewani yang tersedia adalah 20,87 gram per kapita per hari atau 29,73 % dari total protein yang tersedia pada Tahun 2024. Kontribusi terbesar dalam menyumbang ketersediaan protein adalah kelompok buah biji berminyak sebesar 12,14 gram per kapita per hari (17,29%), kemudian berturut-turut daging sebesar 9,41 (13,40%), ikan sebesar 6,40 gram per kapita per hari (9,12%), sayur-sayuran sebesar 5 gram per kapita per hari (7,12%), telur sebesar 4,75 gram per kapita per hari (6,76%), buah-buahan sebesar 1 gram per kapita per hari (1,42%), makanan berpati sebesar 0,52 gram perkapita per hari (0,74%), susu sebesar 0,30 gram per kapita per hari (0,42%), minyak dan lemak sebesar 0,20 gram perkapita per hari (0,28 %) dan gula sebesar 0,11 gram per kapita per hari atau (0,15%).

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15. berikut:

Tabel 3.15. Capaian Kinerja 2022-2024

No	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Skor PPH Ketersediaan	87,5	86,20	101,55	88,5	89,87	101,55	89,5	93,64	104,63
2.	Ketersediaan Energi	3.010 kkal/kap /hr	2.819 kkal/kap /hr	95,32	3.011 kkal/kap /hr	2.870 kkal/kap /hr	95,32	3.012 kkal/kap /hr	2.889 kkal/kap /hr	95,92
3.	Ketersediaan Protein	81,5 gr/kap /hr	70,25 gr/kap/hr	84,40	82 gr/kap/hr	69,21 gr/kap/hr	84,40	82,5 gr/kap/hr	70,19 gr/kap/hr	85,08

Sumber : Dishanpan, 2024

IK : Skor PPH Ketersediaan.

Skor PPH Ketersediaan ideal tentunya adalah sebesar 100, namun untuk Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menargetkan skor PPH

Ketersediaan sebesar **89,5**. Sedangkan realisasi Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2024 adalah sebesar **93,64**.

Jika dibandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja untuk pencapaian Skor PPH Ketersediaan telah terpenuhi sebesar **104,63%**, Angka capaian ini telah mendekati apa yang ditargetkan, dengan nilai capaian indikator kriteria **Sangat Baik**.

IK : Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)

Bila dibandingkan dengan keadaan ketersediaan energi Tahun 2023, maka pada Tahun 2024 terjadi peningkatan ketersediaan energi untuk dikonsumsi masyarakat sebesar 0,76 %, yaitu dari 2.867 Kalori per kapita per hari menjadi 2.889 Kalori per kapita per hari. Bila dilihat secara keseluruhan, total energi dari nabati, terjadi penurunan energi pada tahun 2024. Penurunan energi yang bersumber dari kelompok nabati sebesar 0,26% yaitu dari 2.654 Kalori per kapita per hari di Tahun 2023 menjadi 2.647 Kalori per kapita per hari di Tahun 2024. Sedangkan Energi yang bersumber dari Hewani juga mengalami peningkatan sebesar 13,14 %, yaitu dari 213 Kalori per kapita per hari pada Tahun 2023 menjadi 241 Kalori per kapita per hari pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) per orang per hari yang dianjurkan dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang diadakan pada Tahun 2018 yang menetapkan AKE sebesar 2.400 Kalori, maka Provinsi Jambi masih melebihi anjuran sebesar 2.889 Kalori atau sebesar 120,37 %.

Kontribusi kalori terbesar bersumber dari kelompok bahan makanan padi-padian sebesar 1.240 Kalori perkapita per hari (103,33 %), minyak dan lemak sebesar 718 Kalori perkapita per hari (299,16 %), buah biji berminyak sebesar 214 kalori per kapita per hari (297,22 %), sayur dan buah sebesar 188 kalori perkapita perhari (130,55 %). Sementara kontribusi kalori yang masih kecil bersumber dari kelompok bahan makanan umbi-umbian sebesar 89 kalori perkapita per hari (61,80 %), pangan hewani sebesar 232 kalori perkapita per hari (80,55%), kacang-kacangan sebesar 114 kalori per kapita per hari (95 %) dan gula sebesar 93 kalori per kapita per hari (77,50%).

IK : Ketersediaan Protein (gram/kap/hari).

Berdasarkan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Protein ideal yakni sebesar 63

gram/kap/hari. Terkait hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja telah menetapkan target Ketersediaan Protein sebesar 82,5 gram/kap/hari, sedangkan realisasi angka Ketersediaan Protein Tahun 2024 sebesar 70,19 gram/kap/hari. Capaian ini telah melebihi dari pola pangan harapan ketersediaan protein yang ideal, namun masih jauh dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan persentase realisasi kinerjanya sebesar 85,08% dengan kriteria **tinggi**.

Bila dibandingkan dengan ketersediaan protein per kapita pada Tahun 2022, maka penyediaan protein per kapita di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,48 % yaitu dari 70,25 gram per kapita per hari menjadi 69,21 gram per kapita per hari, untuk protein yang bersumber dari nabati mengalami peningkatan sebesar 8,36 %, yaitu dari 44,59 gram per kapita per hari menjadi 48,32 gram per kapita per hari, penyediaan protein hewani mengalami penurunan sebesar 18,58% yaitu dari 25,66 gram per kapita per hari menjadi 20,89 gram per kapita per hari. Namun Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,98% yaitu menjadi 70,19 gram/kapita/hari dari 69,21. Dari anjuran Angka Kecukupan Protein (AKP) yang ditetapkan sebesar 63 gram per kapita per hari pada tingkat ketersediaan, Provinsi Jambi telah melebihi sebesar 70,19 gram per kapita per hari (111,41 %) dari jumlah yang dianjurkan.

Sasaran 4.

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal dengan indikator kinerjanya yakni :

1. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi.
2. Konsumsi Beras (kg/kap/thn).
3. Konsumsi Energi (kkal/kap/hr).
4. Konsumsi Protein (gr/kap/hr).

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	95,2	92,5	97,169
		Konsumsi Beras	84,5 kg/kap/thn	78,3 kg/kap/thn	107,89
		Konsumsi Energi	2.195,5 kkal/kap/hr	2.012 kkal/kap/hr	91,64
		Konsumsi Protein	61,5 gr/kap/hr	58,73 gr/kap/hr	95,50

Sumber : Dishanpan, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Capaian kinerja sasaran 5, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal dengan indikator-indikatornya telah mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaian yang sangat baik disemua indikatornya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.17. berikut:

Tabel 3.17. Capaian Kinerja 2022-2024

No	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Skor PPH Konsumsi	92,5	93,4	100,97	93,2	93,1	99,89	95,2	92,5	97,169
2.	Konsumsi Beras	88,2 kg/kap/ thn	88,1 kg/kap/ thn	100,11	85 kg/kap/ thn	87 kg/kap/ thn	97,70	84,5 kg/kap/ thn	78,3 kg/kap/ thn	107,89
3.	Konsumsi Energi	2.090,3 kkal/kap /hr	2.070 kkal/ka p/hr	99,03	2.195 kkal/ka p/hr	2.043 kkal/ka p/hr	93,08	2.195,5 kkal/ka p/hr	2.012 kkal/ka p/hr	91,64
4.	Konsumsi Protein	61 gr/kap/ hr	60,7 gr/kap/ hr	99,51	61 gr/kap/ hr	59,5 gr/kap/ hr	97,54	61,5 gr/kap/ hr	58,73 gr/kap/ hr	95,50

Sumber : Dishanpan, 2024

IK : Skor PPH Konsumsi

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter.

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah **Pola Pangan Harapan** atau disingkat dengan **PPH**. Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, target Skor PPH Konsumsi Tahun 2024 yakni sebesar **95,2** dengan realisasi pada Tahun 2024 yakni sebesar **92,5** dengan capaian kinerja sebesar **97,16 %** tergolong dalam kriteria **Sangat Baik**. Angka ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Belum tercapainya kinerja ini dikarenakan pola konsumsi masyarakat kota yang lebih sering makan diluar rumah atau jajan ketimbang memasak sendiri makan akan dikonsumsi. Sehingga keseimbangan komposisi dan kecukupan gizi masih kurang terpenuhi.

Bila kita melihat pada skor PPH untuk masing-masing kelompok pangan, maka ada beberapa kelompok pangan yang belum tercapai yaitu ;

- Umbi-umbian (1,3 dari yang seharusnya 2,5);
- Buah/biji berminyak (0,5 dari yang seharusnya 1);
- Kacang-kacangan (5,5 dari yang seharusnya 10),
- Gula (1,8 dari yang seharusnya 2,5).

IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun).

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yakni **84,5 kg/kap/thn**, berdasarkan hasil perhitungan tingkat konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sesuai data SUSENAS Tahun 2024, maka diperoleh jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar **78,3 kg/kap/thn**, hal ini dapat diartikan bahwa capaian realisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kategori **baik** atau sebesar **107,89 %**. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Upaya untuk penurunan konsumsi beras pada Tahun 2024 tercapai dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi pangan penduduk kearah mengonsumsi selain beras, seperti bergeser ke konsumsi gandum, tepung-tepungan selain beras.

IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari).

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2024 yakni sebesar **2.195,5 kkal/kap/hari**.

Berdasarkan kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2024 yakni sebesar **2.012 kkal/kap/hari**, dengan capaian kinerja sebesar **91,64%** dengan kriteria penilaian **sangat baik**, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari).

Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yakni **61,5 gram/kap/hari** dan telah terealisasi sebesar **58,73 gram/kap/hari**, dengan capaian kinerja sebesar **95,50%** dan kriteria penilaian **sangat baik** hal ini sudah melebihi target capaian yang diinginkan.

Sasaran 5.

Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan indikator kinerjanya, yakni Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan yang operasionalnya didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota, dengan Sub Kegiatan antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi.
2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota.
3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota.
4. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota.
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.18. berikut:

Tabel 3.18. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	% Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi	74,21 %	86,42%	116,45

Sumber : Dishanpan, 2024

Dari tabel di atas bahwa sasaran kinerja dalam Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Tumbuhan dengan indikator-indikatornya mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaianya yang sangat baik..

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19. Capaian Kinerja 2022-2024

No	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	% Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi	69,21 %	88,24 %	127,50	71,71 %	98,44 %	137,28	74,21 %	86,42%	116,45

Sumber : Dishanpan, 2024

IK : Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja Persentase Pengawasan Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi, sebagaimana Peraturan Gubernur Jambi nomor 5 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan, ditargetkan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 2,5% sehingga target kinerjanya pada Tahun 2024 sebesar 86,42% untuk persentase peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dengan realisasi sebesar 116,45%, sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Untuk menghitung Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber data/kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan di peredaran 60%
- b. Registrasi dan Sertifikasi 40%

Adapun perhitungan dari 2 (dua) sumber data tersebut sebagai berikut :

a. Pengawasan di Peredaran

Berdasarkan Juknis Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar dari Badan Pangan Nasional Tahun 2024, dengan pertimbangan Tahun 2023 telah dilakukan pengujian keamanan pangan dengan komoditi beras dan isu keamanan pangan segar, maka Tahun 2024 untuk Dinas Pangan Provinsi melakukan pengujian keamanan pangan terhadap Pangan Segar, yaitu : Apel;

Bawang Merah; Bawang Putih; Kedelai; Kacang Tanah Kupas dengan jumlah sampel menyesuaikan anggaran daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melakukan pengujian keamanan pangan segar untuk 9 sampel.

Data yang dibutuhkan:

1. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T).
2. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N).
3. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P).

CAPAIAN PENGAWASAN DI PEREDARAN :

Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) $= P/N \times 100\%$

Capaian (K) $= Y/T \times 100\%$

Capaian Tertimbang (K1) $= K \times 60\%$

b. Registrasi dan Sertifikasi

Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara izin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT; untuk kabupaten/Kota hanya no izin edar).

A. Capaian Provinsi

Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/ tahun	Capaian (X)
>1000	100%
500 - ≤ 1000	90%
250 - ≤ 500	70%
100 - ≤ 250	60%
50 - ≤ 100	50%
20 - ≤ 50	40%
< 20	20%

B. Capaian Kab/Kota

Jumlah Registrasi/ tahun	Capaian (X)
>200	100%
150 - ≤ 200	90%
100 - ≤150	80%
70- ≤ 100	60%
40 - ≤ 70	50%
10 - ≤ 40	40%
< 10	20%

c. Capaian Total

$$\text{Capaian Total} = K1 + K2$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah melaksanakan pengawasan pangan di peredaran, registrasi dan sertifikasi, sebagai mana uraian berikut :

a. Pengawasan di Peredaran :

Target RPJM	: 74,21% (T)
Sampel pengawasan	: 9 (N)
Sampel yang memenuhi syarat	: 9 (P)
Realisasi Y ($P/N \times 100$)	: 100%
Capaian K ($Y/T \times 100$)	: 134,7527
K Tertimbang (K1) ($K \times 60\%$)	: 80,85%

b. Registrasi dan Sertifikasi :

Sertifikat (realisasi)	: 2
Izin edar	: 19
SPPB PSAT (Sertifikat Penanganan-Pangan yang Baik)	: 2
HC (Health Certificate)	: 19
Jumlah	: 42 (Masuk range 40%)
Capaian Tetimbang (K2)	: 5,57%

c. Capaian Total Daerah : 80,85% + 5,57%
: **86,42%**

Hasil tersebut memang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun bila melihat pada total sample yang diuji, hasil tersebut belum mewakili (tidak representatife) sample aman pestisida untuk dikonsumsi Provinsi Jambi.

Untuk itu kedepan diharapkan jumlah sampel komoditi pangan yang diuji

dapat lebih ditingkatkan dan demikian pula dengan pembinaan terhadap kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) lebih ditingkatkan, sehingga sampel yang diambil dari kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) dapat lebih banyak dan hasilnya lebih baik.

Sasaran 6.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Predikat AKIP.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Predikat AKIP	BB (75)	B (65,7)	87,60
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	89,9	106,39

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Sasaran 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas dengan indikator Predikat AKIP belum mencapai target. Namun indikator IKM sdh mencapai target.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

N0	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Predikat AKIP	B (70)	B (69,69)	99,56	BB (75)	B (64,36)	85,81	BB (75)	BB(65,7)	87,60
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,50	80,9	96,91	84	87,024	103,60	84,50	89,9	106,39

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

IK : Predikat AKIP.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, meliputi : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; dab 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh nilai 65,7 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik.

Dari Tabel 3.20 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih belum selarasnya dokumen perencanaan yang ada. Mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan melakukan koordinasi yang intens dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi terkait penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

IK : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dari Tabel 3.20. di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah mencapai target yang telah ditetapkan dan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen yang kuat baik dari pimpinan, para pejabat dan staf untuk terus memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

3.3. Bentuk Penyajian Data Kinerja

Bentuk penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja tahunan hendaknya juga mempertimbangkan segi-segi efektivitas penyampaian informasi. Oleh karena itu, penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah pada dasarnya dapat dilakukan secara naratif, tabel maupun grafis atau kombinasi diantara ketiganya agar dapat dibaca dengan baik dan mudah dimengerti oleh penggunaanya.

Dalam penyusunan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah perlu dipilih metode-metode penyajian yang cocok. Tidak ada satu bentuk penyajian yang paling unggul secara keseluruhan, sehingga dalam penyusunan laporan kinerja tahunan, masing-masing entitas akuntabilitas pada instansi pemerintah diharapkan dapat menentukan bentuk penyajian yang mana yang cocok untuk menyampaikan suatu informasi tertentu.

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22. Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2020	Target				Capaian				Target 2025	Capaian s/d 2024 terhadap target s.d 2024 (%)
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1.	Skor Pola Pangan Harapan	92,3	90,6	92,5	93,2	95,2	87,3	93,4	93,1	92,5	95,2	97,16
2.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mut dan Keamanan Pangan	64,21 %	66,71	69,21	71,71	74,21	90,91	88,24	87,0	86,42	76,71	116,45
3.	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	9,5%	9,0	7,5	6,5	5,5	9,0	12,14	12,83	10,58	4,5	51,98
4.	Desa Mandiri Pangan	21 Desa	22	31	41	51	22	31	41	98	61	192,16
5.	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	13,75%	19,61	19,61	19,61	19,61	37,13	70,07%	233,1%	66,136	20,42%	337,26
6.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,5%	9,0%	7,5%	6,5	5,5	9,0%	4,90%	2,99%	0	4,5%	
7.	Stabilitas Harga Pangan: a. Pangan Pokok (Beras)	CV<10%	10%	10%	10%	10%	2,5%	2,8%	6,6%	4,2%	10%	238,095
	b. Pangan Strategis (Hortikultura)	CV<58%	30%	30%	30%	30%	10,09%	12,6%	18,1%	12%	30%	250

Sumber : Dishanpan. 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melebihi dari target yang telah ditetapkan diatas 100 %, dengan kriteria sangat baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Landasan Hukum yang kuat berupa Perda Dinas Ketahanan Pangan, Pergub tentang P2KP, SE tentang P2KP, SK Gub tentang DKP dan MOU dengan PKK tentang kerjasama pelaksanaan P2KP.
2. SDM yang memadai yaitu tersedia aparatur menurut gol tingkat pendidikan yang cukup, personil OKKPD, PPNS, Penyuluh dan Kader Pangan.
3. Sudah terbentuk kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sampai ke Kab/Kota, Kec dan Desa.
4. Dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.
5. Kebijakan untuk memperbaiki kondisi jalan sentra produksi.
6. Tersedianya perangkat lunak untuk melakukan analisis dan kajian-kajian.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Transportasi di dan dari Sentra Produksi belum memadai.
2. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal masih sangat terbatas dalam upaya pemenuhan sebagian kebutuhan energi dan umbi-umbian.
3. Keterbatasan Teknologi dan Sarana dalam menyiasati perubahan iklim global untuk memproduksi bahan pangan pokok.

3.4. Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 15.451.501.679.- (92,05%)** dari Total Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar **Rp. 16.785.685.207.-**. Realisasi Anggaran yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Belanja APBD untuk Program Utama sebesar **Rp. 4.350.713.684.- (86,42%)**), dari Total Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Program Utama sebesar **Rp. 5.034.284.640.-**, atau **(29,99%)** dari total anggaran keseluruhan;
2. Realisasi Anggaran Program Pendukung sebesar **Rp. 11.100.787.995,- (94,46%)** dari Total Anggaran yang dialokasikan untuk Program Pendukung sebesar **Rp. 11.751.400.567.-** atau **(70,01 %)** dari total anggaran keseluruhan;
3. Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar **Rp. 9.289.388.244.- (95,99 %)** dari total Anggaran yang dialokasikan pada Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar **Rp. 9.677.259.101.-**

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Realisasi APBD TA. 2024 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

No.	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Dinas Ketahanan Pangan					
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11,993,843,848	11,751,400,567	11,100,787,995	94,46
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297,466,000	297,466,000	184,717,990	62,10
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,000,000	100,000,000	99,930,833	99.93
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197,466,000	289,373,400	146,747,157	50.71
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,674,138,742	9,677,259,101	9,289,388,244	95.99
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,523,393,742	9,534,234,101	9,182,700,224	96.31
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34,370,000	34,370,000	24,746,280	72.00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71,640,000	64,340,000	64,340,000	100
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,130,000	4,130,000	2,085,000	50.48
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16,595,000	16,595,000	3,430,000	20.67
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7,490,000	7,490,000	6,094,000	81.36
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15,020,000	14,600,000	4,492,740	30.77
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000	30,000,000	7,050,000	23.50
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000	30,000,000	7,050,000	23.50
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531,234,000	625,996,902	417,882,249	66.75
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,850,000	8,850,000	7,116,000	80.41
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58,000,000	58,000,000	24,524,340	42.28
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464,384,000	559,146,902	386,241,909	69.08
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159,028,064	176,998,064	173,745,157	98.16
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159,028,064	176,998,064	173,745,157	98.16
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920,580,002	943,680,500	881,804,780	93.44
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,950,002	139,050,500	138,962,780	99.94
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,630,000	120,630,000	58,842,000	48.78
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684,000,000	684,000,000	684,000,000	100
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381,397,040	387,357,040	312,445,775	80.66
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	301,960,000	301,960,000	227,262,775	75.26
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,710,000	21,670,000	21,583,000	99.60
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,710,000	21,670,000	21,583,000	99.60

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		713,000,000	688,878,000	513,133,019	74.49
A. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		713,000,000	688,878,000	513,133,019	74.49
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	88,000,000	88,000,000	0	0.00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	125,000,000	100,878,000	99,375,000	98.51
3	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	500,000,000	500,000,000	413,758,019	82.75
III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1,703,097,000	1,377,059,200	1,222,444,348	88.00
A. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		1,192,189,000	892,285,200	762,021,630	85.40
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	507,398,000	486,478,000	441,405,480	90.73
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	18,500,000	18,500,000	17,687,000	95.61
3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	405,000,000	295,190,000	244,350,000	82.78
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	100,000,000	52,251,000	51,609,150	98.77
5	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	81,287,000	22,715,000	1,200,000	5.28
6	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	80,004,000	17,151,200	5,770,000	33.64
B. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		249,456,000	223,322,000	221,769,232	99.30
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	69,996,000	43,862,000	42,333,757	96.52
2	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	61,550,000	61,550,000	61,549,800	100
3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	71,200,000	71,200,000	71,175,775	99.97
4	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	46,710,000	46,710,000	46,709,900	100
C. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		261,452,000	261,452,000	239,100,718	91.45
1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	117,887,000	117,887,000	105,073,718	89.13
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)	95,384,000	95,384,000	92,162,000	96.62
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	48,181,000	48,181,000	41,865,000	86.89
IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		1,358,754,000	2,305,794,000	2,220,275,125	96.00
A. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		50,091,000	50,091,000	50,091,000	100.00
1	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	50,091,000	50,091,000	50,091,000	100.00
B. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		1,338,663,000	2,255,703,000	2,215,184,125	98.20
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran cadangan pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68,690,000	68,690,000	68,689,975	100.00
2	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1,170,052,000	2,087,092,000	2,079,083,150	99.62
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	50,000,000	50,000,000	47,100,000	94.20
4	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan dan Gizi Provinsi	49,921,000	49,921,000	20,311,000	40.69
V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		381,150,000	183,289,000	121,207,760	66.13
A. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		381,150,000	183,289,000	121,207,760	66.13
1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	75,260,000	19,020,000	381,000	2.00

2	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan	77,806,000	31,976,000	23,659,000	73.99
3	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	69,667,000	18,244,000	10,840,000	59.42
4	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	81,150,000	81,150,000	68,507,760	84.42
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	77,267,000	32,899,000	17,820,000	54.17
JUMLAH		16,179,844,848	16,785,685,207	15,451,501,679	92.05

Sumber : Dishanpan, 2024

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.24. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	5,5	10,58	51,98	2.305.794.000	2.265.275.125,-	98,26
		% Daerah Rentan Rawan Pangan	5,5	0	217,39			
		Desa Mandiri Pangan	51	98	192,16			
2.	Penguatan Cadangan Pangan	% Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	19,61	66,136	337,26	688.878.000.-	513.133.019.-	74,49
3.	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok	CV<10%	CV<4,2%	238,095	1.377.059.200.-	1.222.891.580.-	88,81
		Stabilitas Harga Pangan Strategis	CV<30%	CV<12%	250			
4.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor PPH Ketersediaan	89,5	93,64	104,63			
		Ketersediaan Energi	3.012	2.889	95,92			
		Ketersediaan Protein	82,5	70,19	85,08			
5.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	95,2	92,5	97,16			
		Konsumsi Beras	84,5	78,3	107,89			
		Konsumsi Energi	2.195,5	2.012	91,64			
		Konsumsi Protein	61,5	58,73	95,50			
6.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	% Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	74,21%	86,42%	116,45	183.289.000.-	121.207.760.-	66,13

7.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Pengelolaan Pelaporan yang efektif dan efisien	BB (75)	B (65,7)	87,60	11.751.400.995,-	11.100.787.995	94,46
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	89,9	106,39			
TOTAL						16.785.685.207,-	15.452.501.679,-	92,05

Sumber : Dishanpan, 2024

3.5. Analisis Efisiensi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 telah melampaui target capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan, ini dapat dilihat pada Tabel 3.25. berikut :

Tabel 3.25. Analisis Efisiensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan % Daerah Rentan Rawan Pangan Desa Mandiri Pangan	100%	92,05%	7,95%
2.	Penguatan Cadangan Pangan	% Cadangan Pangan Pemerintah Daerah			
3.	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok Stabilitas Harga Pangan Strategis			
4.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor PPH Ketersediaan Ketersediaan Energi Ketersediaan Protein,			
5.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi Konsumsi Beras Konsumsi Energi Konsumsi Protein			
6.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	% Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			
			16.785.685.207,-	15.452.501.679,-	1.334.183.528,-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan tabel 3.25. di atas, Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah mencapai target, dengan tingkat efisiensi sebesar 7,89 %. Artinya secara keseluruhan Anggaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dialokasikan untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan penyerapan dana 92,05 %, mampu menghasilkan Capaian Kinerja melebihi target 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 7,95%.

BAB 4

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 merupakan Tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebanyak 6 sasaran dengan 14 indikator diperoleh nilai rata-rata dari total realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar **191,48 %**, dengan kriteria penilaian sangat baik.
2. Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100 %.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti:
 - a. Dalam pencapaian target kinerja penurunan penduduk berisiko rentan pangan masih belum sesuai dengan yang telah ditetapkan dikarenakan, indikator untuk menilai penduduk rentan pangan atau tidak, sangat kompleks.
 - b. Keterbatasan teknologi dan sarana prasarana serta dukungan anggaran yang belum memadai dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
 - c. Dalam penetapan kelompok penerima bantuan sosial sering terjadi pergantian nama atau kelompok sasarannya, sehingga membutuhkan waktu untuk prosesnya hingga dapat disalurkan kepada calon penerima manfaat bahkan ada yang tidak tersalurkan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Mengupayakan penanganan penduduk berisiko rawan pangan melalui kegiatan pengembangan korporasi usahatani, pertanian keluarga serta kegiatan lainnya yang langsung menyentuh ke masyarakat/keluarga, guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tersebut.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.
3. Mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan, terutama sekali yang berkaitan dengan bantuan pemerintah/bantuan sosial untuk pencairan dananya dilakukan pada Triwulan I, sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Pihak Pertama,

Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M
Pemina Utama Muda
NIP. 19701025199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	5,5%
		Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	19,61%
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5,5%
		Desa Mandiri Pangan	51 Desa
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	95,2
		Konsumsi Beras (kg/kap/thn)	86,4
		Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.095,1
		Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	62
3.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,5
		Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	3.012
		Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	82,5
4.	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10%
		Stabilitas Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30%
5.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	74,21%
6.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Predikat AKIP	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,3

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	713.000.000.-	APBD
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.703.097.000.-	APBD
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	1.388.754.000.-	APBD
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	381.150.000.-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	11.993.843.848.-	APBD

Gubernur Jambi,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,

Drs. H. SMED WIJAYA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701025 199003 1 002

Penghargaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024

1. Sesuai RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berupaya mendukung Pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

IKP dapat mengetahui kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pencapaian Provinsi Jambi terhadap IKP cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021-2024. Tahun 2021, target IKP sebesar 71,00, realisasinya sebesar 74,18 sehingga realisasi capaian kinerja IKP-nya adalah sebesar **104,48%**, tahun 2022 mengalami penurunan, dimana realisasi IKP sebesar 69,50 dari target 71,00 sehingga realisasi capaian kinerja nya menjadi **97,89%**. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, yakni dari target 72,00 dengan realisasi sebesar 72,17 sehingga Capaian Kinerjanya menjadi **100,24%**. Tahun 2024 IKP Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 74,94 dari target 73. Nilai IKP Provinsi Jambi Tahun 2024 termasuk kelompok Prioritas 6 (Sangat Tahan). Pencapaian Provinsi Jambi ini dapat diartikan bahwa Provinsi Jambi mampu mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menyusun berbagai program dan kegiatan strategis, termasuk peningkatan kapasitas petani, pengembangan infrastruktur pertanian, dan promosi konsumsi pangan bergizi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional, juga dilakukan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi kebijakan ketahanan pangan di daerah. Sebagai wujud kinerja nyata urusan pangan memperoleh penghargaan dari Badan Pangan Nasional, antara lain :
 - Bantuan Mobil Laboratorium Berjalan dari Badan Pangan Nasional, kepada delapan provinsi yang ada di Indonesia dan Provinsi Jambi salah satunya. Mobil ini fungsinya mengecek keamanan pangan karena di dalam mobil tersedia tes kit untuk mendeteksi kandungan pestisida, boraks dan beberapa zat yang diperkenankan untuk pangan segar sehingga bahan pangan yang dijual dipastikan aman untuk dikonsumsi Masyarakat.
 - Bantuan Mobil SPHP dari Badan Pangan Nasional, Bantuan mobil ini hanya diberikan kepada 5 Pemerintah Daerah terpilih (salah satunya Provinsi Jambi) yang berhasil menyediakan sejumlah pangan pokok strategis dengan harga yang

baik dan wajar bagi masyarakat, hal ini menandakan adanya kelancaran distribusi dari produsen, pedagang sampai konsumen, sehingga dapat mengendalikan inflasi. Dengan adanya bantuan mobil ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat terus menyediakan sejumlah pangan pokok strategis dengan harga yang baik dan wajar bagi masyarakat baik di dalam kota maupun daerah-daerah yang belum terjangkau sebelumnya sehingga dapat menstabilisikan pasokan dan harga Pangan.



Capaian Program Dumisake Tahun 2024

NO.	OPD PELAKSANA	KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LOKASI	KET.
1.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Lokal dan Pangan Lainnya dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 (enam) Kelompok Tani Wanita	6 (enam) Kelompok Tani Wanita	Rp. 486.478.000,-	Rp. 441.405.480,-	90,78%	a. KWT Tunjung Biru Kota Sungai Penuh Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sei Penuh b. KWT Pematang Gadung Maju Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari c. KWT Rantau Gedang Indah Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari d. KWT Kuat Desa Berkah Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi e. KWT Delima Desa Marga Manunggal Jaya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi	    

								f. KWT Bungur Jaya Desa Lembak Bungur Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo	
2.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Kegiatan dan Penyaluran Pangan Lokal dan Pangan Lainnya dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Sub Kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga	3 (tiga) Kelompok Tani Wanita	3 (tiga) Kelompok Tani Wanita	Rp. 295.190.000,-	Rp. 244.350.000,-	82,78%	a. KWT Tumbuh Mekar Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci b. KWT Bunga Raya Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh c. KWT Plamboyan Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo	  
3.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	1 (satu) Kelompok Tani	-	Rp. 88.000.000,-	-	-	Kelompok Tani Mulya Mekar Desa Cilodang Kecamatan Pelaepat Kabupaten Bungo	Tidak terlaksananya karena Hasil Verifikasi Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bahwa Kelompok Tani tidak layak menerima bantuan karena nama anggota yang diusulkan tidak sesuai dengan nama anggota yang sebenarnya

		Sub Kegiatan penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya							
4.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 (dua) Kelompok Tani	2 (dua) Kelompok Tani	Rp. 500.000.000,-	Rp. 413.758.019	82,75%	a. Kelompok Tani Karya Makmur Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo b. Kelompok Tani Serai Serumpun Desa Muara Madaras Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin	a. Lantai Jemur  b. Pengadaan RMU 2 Fase Sederhana 
5.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4 (empat) Kelompok Tani	4 (empat) Kelompok Tani	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-	100%	a. Kelompok Tani Karya Muda Desa Bukit Bungkul, Kec. Pamenang Kab. Merangin b. Kelompok Tani Pematang Benteng Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun c. Kelompok Tani Serayu Makmur Desa Wanah Arum Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo	

								d. Kelompok Tani Sri Menanti Desa Koto Dian Kecamatan Hampanan Rawang Kota Sei Penuh	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi
Telp.(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : www.inspektorat@jambiprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

NOMOR : LAP-700/ 147-ITPROV-4/VI/2024
TANGGAL : 13 JUNI 2024
LAMPIRAN : -
HAL : HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2023
TAHUN : 2024

1. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- 7) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: B-700_150/ST/ITPROV-2/IV/2024 Tanggal 29 April 2024 tentang melaksanakan Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III Tahun 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategis yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

WPJ	PT	KT

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem manajemen yang menerapkan siklus *Planning, Do, Check* dan *Act* (PDCA) dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik yang dilaksanakan secara terus menerus.

Evaluasi bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing Perangkat Daerah.

Penerapan SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 memperoleh Kategori "B" yang diinterpretasikan sebagai Perangkat Daerah yang dalam penerapan SAKIP telah Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian perencanaan kinerja atas ketersediaan dokumen, dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan berdampak dalam peningkatan implementasi SAKIP secara efektivitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, yaitu:

- 1) *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi
Teknis Pengumpulan Data dan Informasi berupa menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

WPJ	PT	KT
		

- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Teknis Tanya Jawab Sederhana merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan *chat*.
- 3) Observasi
Teknis observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor Provinsi Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a) Kasub Bag. Perencanaan dan Evaluasi.
 - b) Kasub Bag Umum
3. Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - a) Kasi Distribusi Pangan
 - b) Kasi Harga Pangan
 - c) Kasi Cadangan Pangan
4. Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - a) Kasi Konsumsi Pangan
 - b) Kasi Panganekaragaman Pangan
 - c) Kasi Seksi Keamanan Pangan
5. Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - a) Kasi Ketersediaan Pangan
 - b) Kasi Sumberdaya Pangan
 - c) Kasi Kerawanan Pangan
6. UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan
 - a) Kasub. Bag Tata Usaha
 - b) Kasi Pelayanan Teknis
 - c) Kasi Pengujian Sertifikasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Penetapan kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis 2021-2026 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

WPJ	PT	KT
		

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanganan daerah rawan pangan dan pungutan cadangan pangan	Persentase Penduduk Berisiko Rentan Pangan)	1. Membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. 2. Menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Coefficient of Variation (CV). Prosedur perhitungan MDER yaitu : (1). Menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data susenas. (2). Menghitung kebutuhan energy Minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian. 3. Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 kkal dikalikan dengan angka kelahiran. 3. Menghitung PoU yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya dibawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan PoU = $\int x < MDER f(x) dx$ $CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$ PoU = $\int x < MDER f(x) dx$ merupakan distribusi konsumsi kalori $CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$ Sumber: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018) Keterangan: $f(x)$ = fungsi densitas $CV(x)$ = total simpangan baku $CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita $CV(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179	Perhitungan PoU bersumber dari Susenas (survey nasional) yg dilaksanakan oleh BPS dan Balitbankes.	
		1. Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Provinsi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi}} \times 100\%$		
		2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Daerah/Kecamatan Rentan}}{\text{Total Kecamatan yang ada di Provinsi Jambi}} \times 100\%$		
		3. Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri		
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	1. SKOR PPH Konsumsi 2. Konsumsi beras Konsumsi Energy 3. Konsumsi Protein	% AKE = kalori real : jumlah kalori standar (2.100 kkal) x 100 Skor AKE = % AKE x Bobot per kelompok pangan. Skor PPH = Skor AKE dibandingkan dengan skor maksimal (standart) kelompok pangan $\frac{\text{Jumlah konsumsi beras per hari (gram)} \times 365}{1000} = \text{kg/kap/tahun}$ $\frac{\text{Konsumsi Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ $\frac{\text{Konsumsi Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$		
3	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	1. SKOR PPH KETERSEDIAAN 2. Ketersediaan Energi 3. Ketersediaan Protein	% AKE = Kontribusi Energi (kkal) 2.400 kalori x 100 Skor PPH riil = % AKE x Bobot. Skor PPH = Skor PPH riil > Skor PPH maks, Skor PPH = Skor PPH maks. $\frac{\text{Skor PPH riil} < \text{Skor PPH maks, Skor PPH} = \text{Skor PPH riil}}{100}$ $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$		
4	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok Beras Stabilitas Harga Pangan Strategis	$CV = \frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Harga rata-rata}} \times 100\%$		
5	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Sampel Pangan yang Aman di Konsumsi sesuai Standar yang Berlaku dalam Kurun Waktu tertentu x 100% $\frac{\text{Jumlah Pangan Segar yang Aman Konsumsi (bersertifikat)} \times 100\%}{100\%}$ Jumlah pangan segar yang aman konsumsi (bersertifikat) x 100%		

WPJ	PT	KT
		

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanganan Daerah Rawan pangan dan Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Penduduk berisiko rawan pangan	6,5 % (B)
		Presentase Peningkatan cadangan pangan pemda	19,61
		Persentase daerah rentan rawan pangan	6,5
		Desa Mandiri Pangan	41 desa
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal	Skor PPH Konsumsi	93,2
		Konsumsi beras	87,3
		Konsumsi Energi	2.095
		Konsumsi Protein	61,5
3	Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal	Skor PPH ketersediaan	88,5
		Ketersediaan energi	3,011
		Ketersediaan protein	82
4	Meningkatkan akses thd bahan pangan	Stabilitas harga pangan	CV<10%
		Stabilitas harga pangan strategis	CV<30%
5	Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal tumbuhan	Presentase pangan segar asal tumbuhan yg memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	71,71%
		Nilai Sakip	64,36(B)

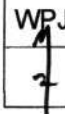
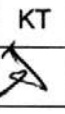
Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp23.900.036.592,00 yang digunakan untuk melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan, 54 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	11.007.019.872,-
2	Program Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.	5.968.713.240,-
3	Program Peningkatan disersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	3.800.962.703,-
4	Program penanganan kerawanan pangan.	2.835.290.250,-
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	288.050.527,-
JUMLAH		23.900.036.592,-

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

WPJ	PT	KT
		

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dians Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai **65,70** kategori "**B**" dengan interpretasi "**Baik**" dengan catatan. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30%	5,40	7,20	12,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	4,80	6,30	7,50	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	2,40	3,60	4,50	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	4,50	3,75	3,75	12,00
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100	17,10	20,85	27,75	65,70

H. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tahun 2021, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran kertas kerja perhitungan capaian kinerja	Selesai ditindaklanjuti
2	Menyusun perjanjian kinerja dengan indikator kinerja yang smart pada level staf	
3	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	
4	Indikator Kerja Utama (IKU) harus sama dengan yang ada dalam renstra	
5	Membuat SK/SOP/Petunjuk Teknis Pedoman Evaluasi Akuntansi Kinerja Internal.	
6	Membuat Surat penegasan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan AKIP tahun 2021.	

WPJ	PT	KT
		

II. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/Kep.Gub/Setda.Org-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 16 Agustus 2022;
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025;
- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek/tahunan yaitu Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Perubahannya;
- 5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023; dan
- 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu DPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya.

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan/ditetapkan yaitu: Renstra beserta perubahannya, Renja beserta perubahannya, Rencana Aksi, dan DPA beserta perubahannya;
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tetapi tidak dilampirkan pada aplikasi esr.menpan.go.id diantaranya: PK eselon II, LKjIP Tahun 2023, Rencana Aksi 2023, Cascading, Pohon Kinerja, Renja 2023, IKU 2021-2026, Renstra 2021-2026;
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu perjanjian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) sudah diturunkan pada unit kerja s/d Eselon IV melalui diagram pohon kinerja;
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra sudah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah, sebagaimana berikut:

Tujuan	Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan
Sasaran	Penanganan Daerah Rawan Pangan
	Penguatan Cadangan Pangan.
	Meningkatkan Akses Terhadap Bahan Pangan
	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal
	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal.
	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Sayur dan Buah

- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART yaitu target kinerja pada dokumen perencanaan Renstra dan Renja sudah masuk dalam kriteria SMART (*specific*/jelas tujuannya, *measurable*/memiliki indikator yang dapat diukur, *achievable*/bisa tercapai, *relevan*/sesuai dengan visi/misi/tujuan Perangkat Daerah, *time bond*/terdapat target waktu yang jelas), sebagaimana berikut:

WPJ	PT	KT
		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan.	1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	7,5	6,5	5,5	4,5	3,6
			2. Desa Mandiri Pangan	31	41	51	61	71
		Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	19,61	19,61	19,61	20,42	20,4
		Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	1. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	11 Kab/ kota	11 Kab/ kota	11 Kab/ kota	11 Kab/ kota	11 Kab/ kota
			2. Stabilitas Pangan Pokok	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
			3. Stabilitas Pangan Strategis	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%
		Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Konsumsi	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5
			2. Konsumsi Beras (kg/kap/thn)	88,2	87,3	86,4	86,2	86
			3. Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2090,3	2095	2095,1	2100	2100
			4. Konsumsi Protein gr/kap/hr)	61	61,5	62	62,5	63
2	Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5
			2. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	3,010	3,011	3,012	3,013	3,014
			3. Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	81,5	82	82,5	83	83,5
		Meningkatkan Mutu dan keamanan Pangan Asal Tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*/tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) yaitu IKU selaras dengan tujuan dan sasaran disetiap dokumen Renstra dan Renja serta IKU tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Renstra Tahun 2021-2026;
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis yaitu target minimal yang ditetapkan pada Renja sesuai dengan Renstra;
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) yaitu diagram *Cascading* telah menunjukkan kesinambungan antara tujuan dengan sasaran dan antara organisasi dengan unit kerja;

WPJ	PT	KT
		

- 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- 10) Setiap unit kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu pegawai eselon II s/d IV dan seluruh pegawai fungsional dan struktural telah membuat perencanaan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK); dan
- 11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu Pegawai struktural, fungsional, dan staff menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja.

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai yaitu pada DPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 jumlah anggaran sebesar Rp23,900,036,592,00 dengan jumlah 5 program, 14 kegiatan, 54 sub kegiatan;
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi telah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja;
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau masih *on the right track* yaitu target triwulan dalam Rencana Aksi sesuai dengan target setiap triwulan yang telah ditetapkan pada Renja;
- 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan pada monev triwulan 1,2,3, dan 4 menunjukkan realisasi target setiap triwulan dan dokumen monev ditandatangani pejabat terkait;
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yaitu langkah perbaikan kinerja tertuang di Renja;
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yaitu Renja memuat target kinerja yang lebih baik;
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Eselon 2, dan 3 telah membuat PK sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran; dan
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Setiap pegawai membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- 1) Terdapat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor: 59/SK/DISHANPAN-1.1/VIII/2023 tentang Petunjuk teknis Pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yaitu IKU, Renstra, Renja, PK, dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020; dan
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP 475/DISHANPAN-1.2/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Kinerja.

WPJ	PT	KT
		

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja yaitu terdapat lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah;
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yaitu terdapat sumber data pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP Unit Kerja;
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yaitu ada data capaian kinerja realisasi fisik dan keuangan serta formulasi perhitungan capaian kinerja sesuai dengan IKU;
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu dokumentasi, tetapi tidak terdapat jadwal dan notulensi ;
- 5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yaitu terdapat laporan monev triwulan 1,2,3, dan 4 disertai dengan daftar hadir dan diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah;
- 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi <http://simantap.jambiprov.go.id> aplikasi SKP Online (<http://skp.jambiprov.go.id>, SIPD Kemendagri <https://sipd.kemendagri.go.id>, Aplikasi <http://paket.jambiprov.go.id>
- 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yaitu Peraturan Gubernur Jambi Nomor 271/KEP.GUB/BKD-5.1/2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional yaitu terdapat Pergub/Kepgub mengenai penempatan/penghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kinerja pegawai Nomor 62/KEP.GUB/BKD-3.3/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja dan Tim Sekretariat Penilai Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023;
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi yaitu dokumen perencanaan kinerja mengalami pergeseran atau perubahan (Renja Perubahan)/ terdapat penyesuaian dalam target;
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja yaitu hasil Monev Triwulan tetapi belum sepenuhnya menginformasikan realisasi kinerja, faktor hambatan dan solusi serta rekomendasi perbaikan;
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja yaitu Kepala Perangkat Daerah membuat penyesuaian kebijakan dengan terbitnya Renja Perubahan yang telah diformalkan;
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja yaitu terdapat perubahan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- 7) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja yaitu terdapat perubahan atau penyesuaian anggaran berdasarkan Renja Perubahan dan hasil pengukuran kinerja pada Monev Renja Triwulan;
- 8) Efisiensi anggaran belum disajikan atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yaitu LKjIP belum menginformasikan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan;
- 9) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yaitu SKP bulanan setiap pegawai memberikan laporan pengukuran kinerja bulanan yang memberikan informasi mengenai target dan realisasi capaian kinerja setiap bulan, tetapi SKP belum dilampirkan.

WPJ	PT	KT
		

C. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 telah disusun;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu LKjIP telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai stempel Perangkat Daerah;
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan tetapi tidak dilampirkan bukti upload pada aplikasi esr.menpan.go.id pada aplikasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. jambiprov.go.id;
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tidak tepat waktu yaitu Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Cq. Biro Organisasi Nomor: S-428 /DISHANPAN-1.1/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 hal Penyampaian LKjIP Tahun 2023.

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yaitu penyusunan LKjIP sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yaitu pada bab III LKjIP telah menyajikan capaian Kinerja;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 7) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- 8) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan
- 9) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Kualitas Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) yaitu penetapan LKjIP dan Monev selalu dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tetapi tidak melampirkan notulen;
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai yaitu LKjIP memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran yang tertera pada PK;
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sudah sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan;
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP menyajikan informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yaitu LKjIP menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran;

WPJ	PT	KT
		

- 6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yaitu terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja berjalan; dan
- 7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yaitu seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen dan adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen serta adanya rekomendasi atas kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

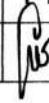
- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada unit kerja/Perangkat Daerah yaitu terdapat rekapitulasi Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4; dan
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yaitu Proses monev dilakukan secara *bottom up*.

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar yaitu SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jambi Nomor: 60/SK/DISHANPAN-1.1/VIII/2023 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dengan bukti sertifikat Bimtek tentang Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu Monev Triwulan telah menginformasikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi; dan
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum optimal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/Perangkat Daerah yaitu Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang di *input* pada monev sesuai dengan PK (JPT Pratama, Adminsitrator, Pengawas/atau yang disetarakan beserta 1 orang pegawai) yang telah disetujui/ditetapkan.

c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti yaitu rekomendasi perbaikan atas faktor hambatan pada Monev telah dilaksanakan dan ada peningkatan realisasi target pada Monev Triwulan berikutnya;
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yaitu rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya (2021) telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

WPJ	PT	KT
		

E. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria/ Kode warna
1	Penanganan Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	%	6,5	12,83	50,66	
		% Daerah Rentan Rwan Pangan	%	6,5	2,99	217,39	
		Desa Mandiri Pangan	Dea	41	41	100,,00	
2	Penguatan Cadangan Pangan	% Cadangan Pangan Pemerintan Daerah	%	19,61	233,1	1.188,68	
3	Meningkatkan Kases Terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV<10%	CV<10%	CV<6,6%	151,52	
		Stabilitas Harga Pangan Strategias (Hortikultura)	CV<30%	CV<30%	CV<18,1%	165,75	
4	Memantapkan ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian	Skor PPH Ketersediaan	Skor	88,5	89,87	101,55	
		Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/hr	3,011	2.870	95,32	
		Ketersediaan Protein	Gr/Kap/hr	82	69,21	84,40	
5	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,2	93,1	99,89	
		Konsumsi Beras	Kg/kap/thn	85	87,0	97,70	
		Konsumsi Energi	Kkal/kp/hr	2.195	2.043	93,08	
		Konsums Protein	Gr/kap/hr	61	59,5	97,54	
6	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	% Peningkatan Pengawasan dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jambi	%	71,71	98,44	137,28	

III. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Agar Dokumen Laporan Kinerja di upload pada aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu;
- 2) Agar Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Pelaksana disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan;
- 3) Agar Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappeda Paling Lambat 1 (satu) Minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi;
- 4) Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;

WPJ	PT	KT
		

- 5) Agar melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Rencana Aksi dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;
- 6) Agar Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan;
- 7) Agar mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja; dan
- 8) Agar Dokumen Laporan Kinerja meinginformatikan efisiensi atas penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah 65,70 kategori "Baik" dengan Predikat "B".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan komponen/sub komponen dan bobot penilaian AKIP pada Kertas Kerja Evaluasi sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja perkomponen dengan tahun sebelumnya.

B. Saran

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan merupakan tanggung jawab pimpinan. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di unit kerja yang dipimpinnya sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan diharapkan meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit kerja sehingga Laporan Kinerja unit kerja lebih baik pada tahun yang akan datang, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690819 199703 1 004

WPJ	PT	KT



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Samarinda Kotabaru Jambi – 36001

Telp. (0741) 42470 – Fax. (0741) 42795

Website : www.dishanpan.jambiprov.go.id

Jambi, 8 Juli 2024

Nomor : S-260/DISHANPAN-1.1/VII/2024
Sifat : -
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Tindaklanjut LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023

Yth. Inspektur Daerah Provinsi Jambi
Di

J A M B I

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor : LAP-700/147/ITPROV-4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan tindak lanjut hasil rekomendasi LHE AKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701025 199003 1 002

**MATRIK TINDAK LAJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 (2024)**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Progres Penyelesaian
1	Agar Dokumen Laporan Kinerja diupload pada aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu	Dokumen Laporan Kinerja akan diupload pada aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu	1 (satu) Dokumen LKj	Februari 2025	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Februari 2025
2	Agar Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II, III,IV dan Staf Pelaksana disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan	Menyusun Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II, III,IV dan Staf Pelaksana serta diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan	1 (satu) Dokumen PK	Januari 2025	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Januari 2025
3	Agar Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD diitetapkan untuk diverifikasi	Menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan	1 (satu) Dokumen Ranhir RENJA DISHANPAN Tahun 2025	Juni 2024	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Juni 2024
4	Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Akan lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dari Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan	Laporan Capaian Kinerja	Triwulan 2, 3 dan 4	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Triwulan 2, 3 dan 4
5	Agar melakukan Monev Rencana Aksi dan Evaluasi Renja Triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Pergub Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas	Melakukan Rapat Monev Capaian Rencana Aksi dan Evaluasi Renja Triwulan 2, 3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD	Rapat Monev Capaian Rencana Aksi dan Evaluasi Renja	Triwulan 2, 3 dan 4	Dishanpan Provinsi Jambi	Triwulan 2, 3 dan 4

6	Agar Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan	Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan dengan	Rapat Monev Capaian Rencana Aksi dan Evaluasi Renja	Triwulan 2, 3 dan 4	Dishanpan Provinsi Jambi	Triwulan 2, 3 dan 4
7	Agar mengoptimalkan pemantauan atau pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektif dan efesiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja	Pimpinan akan lebih mengoptimalkan pemantauan atau pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektif dan efesiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja	Rapat Monev Capaian Rencana Aksi dan Evaluasi Renja	Triwulan 2, 3 dan 4	Dishanpan Provinsi Jambi	Triwulan 2, 3 dan 4
8	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan efesiensi atas penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja yang menyajikan analisis efesiensi atas penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	1 (satu) Dokumen LKj	Desember 2024	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Desember 2024


KERALA DINAS,
Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701025 199003 1 00